

226

Prospek Indonesia Memasuki Tahapan Newly Industrializing Country

Hadi SOESASTRO

PENGANTAR

Pertumbuhan ekonomi yang spektakuler yang terjadi di Jepang setelah Perang Dunia II kerap kali dilihat sebagai sumber ilham bagi beberapa negara, seperti Korea Selatan, dalam merumuskan dan menjalankan strategi pembangunan mereka yang bertujuan mempercepat pertumbuhan dan memperdalam pembangunan ekonomi. Korea Selatan dan sejumlah negara lain, seperti Taiwan, Hongkong, dan Singapura di Asia serta Brasilia dan Meksiko di Amerika Latin, dan juga Yugoslavia dan Yunani di Eropa, sejak paruh kedua dasawarsa 1970-an dimasukkan dalam suatu kelompok baru yang kini secara luas dikenal sebagai kelompok negara industri baru, *newly industrializing countries*, atau disingkat NICs.

Kelompok NICs ini secara konseptual dilihat sebagai suatu *kelompok peralihan*, yang berada di antara kelompok negara-negara berkembang dan kelompok negara-negara industri maju, karena telah memasuki suatu tahapan pembangunan ekonomi yang memungkinkan ekonomi tersebut melaksanakan transformasi (yang sesungguhnya) untuk menjadi suatu negara industri maju (*advanced industrial country*).

Timbulnya pengelompokan ini mungkin merupakan pencerminan suatu optimisme baru bahwa negara-negara berkembang sebenarnya dapat melangkah ke anak tangga berikutnya, bahkan mengejar kelompok negara yang sudah berada di anak tangga yang lebih tinggi. Setelah Perang Dunia II pernah berkembang apa yang disebut *modernization research* dengan fokus pada faktor-faktor yang telah menyebabkan dan menggerakkan Revolusi Industri di Eropa, dan meneliti sejauh mana dapat ditarik analoginya bagi negara-

negara berkembang dan prospek pembangunannya. Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa proses industrialisasi Eropa tidak dapat dipakai sebagai contoh bagi negara-negara berkembang karena kondisi di akhir abad ke-20 yang sudah sangat berlainan dari yang ada pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa. Perbedaan utama adalah: (a) negara-negara berkembang pada dewasa ini dihadapkan pada beberapa permasalahan sekaligus, sedangkan di waktu lalu permasalahan itu datang secara berurutan sehingga lebih mudah dipecahkan; dan (b) kesenjangan teknologi yang semakin besar membuat negara-negara berkembang dewasa ini menjadi sangat tergantung pada pengalihan teknologi dari negara-negara industri maju.¹ Secara implisit kesimpulan ini meramalkan betapa sulitnya, dan bahkan hampir tidak mungkin, bagi negara-negara berkembang untuk melangkah naik ke anak tangga pembangunan yang lebih tinggi guna mengejar ketinggalan mereka.

Keadaan pada tahun 1970-an berbeda, dan timbullah apa yang disebut *miracle research* dengan fokus pada faktor-faktor yang telah menyebabkan dan terus-menerus menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Jepang, dan meneliti sejauh mana proses ini telah mempengaruhi dan mengilhami pembangunan di Korea Selatan ataupun Taiwan, dan apakah kesimpulan yang sama juga dapat dibuat untuk NICs lainnya di Asia, yaitu Hongkong dan Singapura. Tampaknya *miracle research* ini lebih terfokus pada kawasan Pasifik Barat (atau Asia Timur) karena memang perkembangan di antara NICs dari kawasan ini lebih spektakuler daripada di kawasan lainnya. Pada tahun 1950, misalnya, jika diukur dalam nilai dollar tahun 1974, pendapatan per kepala di Taiwan dan Korea Selatan adalah US\$224 dan US\$146, jauh di bawah Brasilia dan Meksiko, masing-masing US\$373 dan US\$562. Pada tahun 1980, pendapatan per kepala di Taiwan dan Korea Selatan telah meningkat menjadi US\$2.720 dan US\$1.533, sedangkan di Brasilia dan Meksiko menjadi US\$1.780 dan US\$1.640.

Sebenarnya di antara keempat negara Asia Timur yang kini berada dalam kelompok NICs itu sendiri terdapat perbedaan-perbedaan yang *menyulitkan generalisasi*. Walaupun demikian ada beberapa faktor persamaan yang seringkali diduga merupakan faktor-faktor yang secara positif mempengaruhi proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mereka. Faktor-faktor ini adalah: (a) pola pembangunan yang *kapitalistik*; (b) *orientasi ke luar* (pasar *ekspor*); (c) pemanfaatan *modal asing secara terarah*; (d) ketersediaan sumberdaya alam yang sangat terbatas, dan karenanya, mungkin dikompensir oleh usaha-usaha sejak dini untuk *mengembangkan sumberdaya manusia*; (e) kebudayaan *sinica* (Cina) yang sangat mempengaruhi masyarakat mereka; (f) *peranan aktif pemerintah* dalam ekonomi tetapi yang bersifat *mengarahkan dan memperkuat mekanisme pasar*; dan (g) *stabilitas pemerintahan*, walaupun

¹Lihat Rudolf Hamann, "The Industrial Revolution in Europe: A Model for the Developing

seringkali bersifat *otoriter*, atau lebih tepatnya bersifat otoriter lunak (*soft authoritarian*).²

Selain faktor-faktor intern di atas, ada kemungkinan perkembangan spektakuler yang dialami negara-negara tersebut telah dibantu oleh kondisi *eksternal* yang sangat menguntungkan, yaitu *sistem perdagangan internasional yang relatif bebas, sistem moneter internasional yang relatif stabil, dan arus penanaman modal asing dan bantuan luar negeri yang meningkat*. Seperti kita ketahui, faktor-faktor ekstern ini tidak lagi tersedia sekarang. Inilah sebabnya mengapa kini banyak dipertanyakan sejauh mana negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dapat mengikuti jejak kelompok NICs ini. Pertanyaan yang juga dapat diajukan adalah apakah tersedia *alternatif* lain.

Sebelum kita membahas prospek bagi Indonesia untuk menjadi suatu negara industri baru (NIC) pada akhir abad ini atau permulaan abad ke-21, ada baiknya kita mencoba meneliti terlebih dahulu ciri-ciri suatu NIC. Hingga kini suatu ketentuan umum memang belum ada.

CIRI-CIRI NICs

Sejumlah negara berkembang yang kini dianggap berada dalam kelompok NICs semuanya berada dalam kelompok *upper middle-income developing countries* menurut klasifikasi Bank Dunia, yaitu dengan PNB (Produk Nasional Bruto atau GNP) per kepala sebesar US\$1.600 pada tahun 1985.³ Beberapa negara dalam kelompok ini, seperti Malaysia, belum dianggap sebagai NIC, mungkin karena saham sektor manufaktur dalam PDB (Produk Domestik Bruto) masih di bawah 20%. Seperti terlihat pada Tabel 1, pada tahun 1985 saham sektor manufaktur dalam PDB di berbagai NICs berkisar pada 25% ke atas. Di negara-negara ini saham sektor manufaktur sebesar 25% ke atas itu sebenarnya telah dicapai rata-rata pada pertengahan dasawarsa 1970-an, bahkan sekitar 10 tahun lebih awal lagi di Brasilia dan di Taiwan.

Muangthai seringkali disebut belakangan ini sebagai negara ASEAN berikutnya yang akan menjadi NIC. Saham sektor manufaktur dalam PDB Muangthai telah mencapai 20% pada tahun 1985 dengan kecenderungan peningkatan yang cukup pesat. Namun pendapatan per kepala di Muangthai baru US\$800 pada tahun 1985. Beberapa sarjana ekonomi Thai beranggapan bahwa selama sektor pertanian Muangthai masih merupakan penyerap utama tenaga kerja, selama itu pula sulit rasanya Muangthai ditempatkan dalam kelompok NICs. Seperti terlihat pada Tabel 2, sektor pertanian masih merupakan penyedia lapangan kerja yang utama di Muangthai; pada tahun 1980 sebanyak 71% angkatan kerja berada di sektor pertanian. Hal ini berarti

² Lihat Daftar Referensi

Tabel 1
 BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI (I) DI SEJUMLAH NEGARA

Negara	Penduduk (juta)	PNB per kepala (\$)	Saham dalam PDB (%)			
			Pertanian		Manufaktur	
			1965	1985	1965	1985
Korea (S)	40,1	2.150	39	14	19	28
Taiwan	19,1	3.067 ^a	24	7 ^a	24	41 ^a
Singapura	2,6	7.420	3	1	15	24
Meksiko	78,8	2.080	14	11	21	24 ^a
Brasil	135,6	1.640	19	13	26	27 ^a
Indonesia	162,2	530	56	24	8	14
Muangthai	51,7	800	35	17	14	20
Malaysia	15,6	2.000	30	21 ^a	10	19 ^a
Turki	50,2	1.080	34	19	16	25

^a1984

Sumber: World Bank, *World Development Report 1986 dan 1987*; data-data Taiwan diambil dari berbagai penerbitan (lihat Daftar Referensi).

bahwa sektor industri, khususnya sektor manufakturnya, walaupun telah berkembang dengan pesat tidak cukup cepat menyerap tenaga kerja. Hal yang sama juga terjadi di Turki, suatu negara yang juga diperkirakan segera akan menjadi NIC. Sebenarnya saham sektor manufaktur dalam PDB di Turki bahkan sudah jauh lebih tinggi daripada di Muangthai, dan pada tahun 1985 sudah mencapai 25%. Tetapi selain segi penyerapan tenaga kerja tersebut, pendapatan per kepala yang juga masih di bawah kelompok *upper middle-income*, belum menempatkan Turki sebagai suatu NIC. Ada kemungkinan bahwa antara tingkat pendapatan per kepala dan proporsi angkatan kerja di sektor pertanian terdapat korelasi yang cukup kuat.

Tabel 2 menunjukkan bahwa dalam kelompok NICs lapangan kerja yang disediakan oleh sektor industri rata-rata berada di atas 25% dari seluruh lapangan kerja. Jika tersedia data lapangan kerja di sektor manufaktur, akan dapat terlihat perbedaan yang lebih nyata dalam besarnya saham sektor manufaktur dalam penyediaan lapangan kerja antara kelompok NICs dengan kelompok negara berkembang lainnya. Tabel 2 juga menunjukkan perbedaan *tingkat produktivitas* antara ekonomi-ekonomi yang bersangkutan, seperti

manufaktur umumnya lebih tinggi bagi kelompok NICs daripada bagi kelompok negara berkembang lainnya. Biarpun demikian tidak jelas apakah dapat ditentukan suatu *cut-off point* yang membedakan kelompok satu dengan yang lainnya. Nilai tambah per kepala di sektor manufaktur di Malaysia, misalnya, lebih tinggi daripada di Brasilia.

Tabel 2

BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI (II) DI SEJUMLAH NEGARA

Negara	Distribusi Lapangan Kerja (%)						Nilai Tambah Per Kepala (US\$)	
	Pertanian		Industri		Jasa-jasa		Pertanian	Manufaktur
	1965	1980	1965	1980	1965	1980	1984	1984
Korea (S)	55	36	15	27	30	37	306	665
Taiwan	50	22	23	37	27	41	-	-
Singapura	6	2	27	38	68	61	60	1.542
Meksiko	50	37	22	29	29	35	225	564
Brasilia	49	31	20	27	31	42	260	429
Indonesia	71	57	9	13	21	30	133	83
Muangthai	82	71	5	10	13	19	197	167
Malaysia	59	42	13	19	29	39	431	442
Turki	75	58	11	17	14	25	394	324

Sumber: Sama dengan Tabel 1.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diajukan suatu rumusan sederhana mengenai ciri-ciri suatu NIC yaitu suatu negara yang berdasarkan besarnya PNB per kepala termasuk kelompok negara *upper middle-income* menurut Bank Dunia, dan di mana *saham sektor manufaktur dalam PDB dan dalam penyerapan tenaga kerja sesedikitnya 25%*.

Di antara kelompok NICs yang diteliti di atas sebenarnya dapat dibuat penggolongan antara negara-negara yang lebih berorientasi ekspor dan negara-negara yang lebih berorientasi pasar dalam negeri. NICs di Asia, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura, termasuk dalam golongan pertama, sedangkan NICs di Amerika Latin -- seperti Meksiko dan Brasilia -- termasuk dalam golongan kedua, walaupun belakangan ini negara-negara ini juga berusaha meningkatkan ekspor mereka. Namun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan oleh negara-negara dalam golongan kedua ini tetap

Tabel 3 menunjukkan perbedaan peranan ekspor, yaitu dalam besarnya saham ekspor dalam PDB, antara ekonomi-ekonomi bersangkutan. Besarnya saham ini masih di bawah 20% bagi Meksiko dan Brasilia, sedangkan bagi NICs di Asia jauh lebih besar -- bahkan mencapai di atas 200% untuk Singapura. Dari segi nilai ekspor per kepala terdapat perbedaan yang cukup menyolok antara NICs Asia dan NICs Amerika Latin tersebut (Tabel 3). Perbedaan ini semakin menyolok jika yang dibandingkan adalah *nilai ekspor manufaktur per kepala*, yaitu sekitar US\$75 dan US\$78 untuk Meksiko dan Brasilia dibandingkan dengan US\$597 untuk Korea Selatan, US\$1.170 untuk Taiwan, dan US\$5.177 untuk Singapura. Bahkan nilai ekspor manufaktur per kepala dari Malaysia dan Turki lebih tinggi daripada nilai tersebut untuk Meksiko dan Brasilia.

Rasionale dari kebijaksanaan yang lebih protektif di Meksiko dan Brasilia didasarkan pada besarnya pasar dalam negeri mereka sendiri dan untuk melindungi industri dalam negeri, selain atas pertimbangan sosial-ekonomi yang lain. Seperti terlihat pada Tabel 2, produktivitas sektor manufaktur -- seperti dinyatakan oleh besarnya nilai tambah per kepala -- di Brasilia dan Meksiko tidak jauh lebih rendah daripada di NICs Asia. Namun kebijaksanaan protektif tersebut mungkin bahkan cenderung memperburuk pembagian pendapatan di negara-negara itu, yang memang jauh lebih jelek daripada yang terdapat di NICs Asia. Seperti terlihat pada Tabel 4, di Taiwan, misalnya, 20% penduduk berpenghasilan terendah memperoleh sekitar 9% dari pendapatan nasional dan 20% penduduk berpenghasilan tertinggi memperoleh 37% dari pendapatan nasional. Sebagai perbandingan menyolok, di Brasilia, 20% penduduk berpenghasilan terendah mendapat hanya 2% dari pendapatan nasional, sedangkan 20% penduduk berpenghasilan tertinggi mendapatkan 67% dari pendapatan nasional.

Dari segi pengelolaan ekonomi makro sendiri sangat mungkin bahwa kesulitan dalam pembayaran kembali utang (*debt trap*) yang dihadapi oleh Meksiko dan Brasilia merupakan akibat dari kebijaksanaan protektif mereka. Dalam proses pembangunannya, Korea Selatan juga telah menggunakan modal luar negeri, termasuk pinjaman komersial, dalam jumlah yang tidak kecil. Tetapi negara ini tidak terjerumus dalam kesulitan pembayaran kembali utang luar negerinya.

PROSPEK BAGI INDONESIA

Bagi Indonesia, baik karena perkembangan dalam negeri -- yaitu tuntutan untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar -- maupun karena perkembangan di kawasan Asia-Pasifik -- yaitu berlangsungnya semacam

Tabel 3

PERANAN EKSPOR DI SEJUMLAH NEGARA - 1985

Negara	Ekspor sebagai % PDB	Nilai Ekspor Per Kepala (US\$)	Nilai Ekspor Manufaktur ^a Per Kepala (US\$)
Korea (S)	36	737	597
Taiwan	55	1.603 ^b	1.170 ^b
Singapura	212 ^c	8.774	5.177
Meksiko	16	277	75
Brasilia	14	189	78
Indonesia	23	115	13
Muangthai	27	137	48
Malaysia	55	980	362
Turki	19	164	89

^aTidak termasuk produk pengilangan.

^b1984.

^c1981.

Sumber: Sama dengan Tabel 1.

Tabel 4

PERBANDINGAN PEMBAGIAN PENDAPATAN DI SEJUMLAH NEGARA

Negara	Pembagian Pendapatan (%)		Tahun
	20% Penduduk Pendapatan Terendah	20% Penduduk Pendapatan Tertinggi	
Korea (S)	5,7	45,3	1976
Taiwan	8,8	37,2	1978
Singapura	-	-	
Meksiko	2,9	57,7	1977
Brasilia	2,0	66,6	1972
Indonesia	6,6	49,4	1976
Muangthai	5,6	49,8	1976
Malaysia	3,5	56,1	1973
Turki	3,5	56,5	1973

an yang tidak dapat dielakkan. Ada perkiraan -- dan harapan -- bahwa pada sekitar tahun 2000 kawasan Asia-Pasifik (Pasifik Barat), kecuali Indocina, akan terdiri dari NICs dan negara-negara industri maju, suatu *all NIC-dom region* menurut Shinohara.⁴

Dalam bagian terdahulu kita telah mencoba merumuskan ciri-ciri NICs, dan menyimpulkan bahwa status NIC tercapai bila saham sektor manufaktur dalam PDB dan dalam penyerapan tenaga kerja sesedikitnya 25%. Yang kini perlu kita teliti adalah bagaimana proses yang dapat membawa ekonomi Indonesia dari tahapnya dewasa ini untuk dapat memasuki tahapan NIC itu.

Pembahasan terdahulu menunjukkan bahwa orientasi keluar (ekspor) bukan merupakan ciri mutlak suatu NIC, tetapi NIC yang berorientasi keluar telah dapat mencapai kemajuan yang lebih baik. Seperti dapat dilihat pada Tabel 5, NICs Asia secara konsisten mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada Meksiko dan Brasilia. Itulah sebabnya model Asia dianggap lebih superior ketimbang model Amerika Latin.

Negara-negara ASEAN umumnya memilih untuk menerapkan model Asia, walaupun di Indonesia selalu masih terdapat godaan kuat untuk memilih model Amerika Latin dengan alasan pasar dalam negeri yang besar. Memang, pasar dalam negeri Indonesia tidak boleh dikesalkan peranannya walaupun daya beli yang ada masih rendah. Namun masalah yang sebenarnya bukanlah masalah memilih orientasi ke pasar luar negeri atau ke pasar dalam negeri *per se*, tetapi adalah masalah jenis kebijaksanaan dan tingkat proteksi yang diterapkan untuk mengembangkan pasar (dan kemampuan) dalam negeri sambil mengembangkan ekspor.

Secara umum berlaku bahwa mekanisme bagi pertumbuhan pendapatan per kepala di suatu negara pada dasarnya adalah *peningkatan kapasitas produktif* di negara bersangkutan. Jika diandaikan bahwa ketersediaan sumberdaya alam di suatu negara terbatas, maka untuk meningkatkan produktivitas per kepala diperlukan: (a) peningkatan *modal produktif per kepala*; dan (b) peningkatan *produktivitas* melalui perbaikan teknik dan *peningkatan teknologi*. Peningkatan teknik dan teknologi itu biasanya berkaitan dengan peningkatan dalam modal, yaitu melalui mesin-mesin baru. Oleh karenanya, peningkatan modal produktif itu umumnya dianggap merupakan kondisi yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi riil. Di sisi lain, peningkatan modal produktif ini harus dibiayai dengan tabungan, yang pada tahun-tahun permulaan ditunjang oleh modal dari luar negeri.

⁴ Lihat Shinohara, "Trends of the Asia-Pacific Economies, 1960-2000," dalam *The*

Tabel 5

PERTUMBUHAN EKONOMI DI SEJUMLAH NEGARA

Negara	Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Per Tahun (%)			
	PDB		Sektor Manufaktur	
	1965-80	1980-85	1965-80	1980-85
Korea (S)	9,5	7,9	18,8	9,0
Taiwan ^a		9,2		13,3
Singapura	10,2	6,5	13,3	2,1
Meksiko	6,5	0,8	7,4	
Brasilia	9,0	1,3	9,8	
Indonesia	7,9	3,5	12,0	6,4
Muangthai	7,4	5,1	10,9	5,3
Malaysia	7,3	5,5		6,1
Turki	6,3	4,5	7,5	7,9

^a1962-1984.

Sumber: Sama dengan Tabel 1.

Kondisi untuk "take-off" (tinggal landas) ini secara formal dirumuskan oleh Tsiang sebagai berikut:⁵

$$S/Y > (K/Y).I$$

yang berarti bahwa propensitas rata-rata untuk menabung (S/Y) harus lebih besar daripada *capital output ratio* rata-rata (K/Y) dikalikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk (I). Berdasarkan rumusan itu kiranya jelas bahwa kebijaksanaan ekonomi yang menunjang pertumbuhan dan pembangunan perlu melibatkan usaha-usaha sebagai berikut: (1) *program keluarga berencana*; (2) *peningkatan propensitas untuk menabung*; (3) *kebijaksanaan moneter dan perpajakan* yang memberikan rangsangan untuk menabung dan untuk menanamkan modal dalam kegiatan usaha yang produktif; (4) *pengenalan teknologi* yang sesuai dan yang diperbaiki dalam semua bidang produksi; (5) *pengalokasian sumberdaya ekonomi* seoptimal mungkin. Pokok-pokok ini

bukanlah suatu preskripsi baru. Tetapi pengalaman keempat NICs Asia, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura, menunjukkan betapa tepat preskripsi tersebut untuk diikuti.

Pengalaman negara-negara itu juga menunjukkan betapa pokok dan "crucial" peranan yang dimainkan oleh *liberalisasi di bidang perdagangan*, terutama dalam mengoptimalkan alokasi sumberdaya ekonomi mereka. Di antara keempat NICs Asia tersebut Taiwan merupakan yang pertama yang mengambil langkah-langkah ke arah itu, yaitu semenjak paruh kedua dasawarsa 1950-an. Bertentangan dengan pemikiran yang berlaku saat itu, Taiwan menolak perlunya mempertahankan nilai tukar yang "overvalued," dan mengambil tindakan mendevalusi mata uangnya (1955) sambil melakukan liberalisasi di bidang perdagangan. Pada tahun 1961 Korea Selatan melakukan tindakan yang sama. Hongkong dan Singapura, karena peranannya sebagai entrepot, sebenarnya telah merupakan ekonomi yang cukup terbuka sejak semula.

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan liberalisasi di sektor perdagangan, seperti tertuang dalam berbagai paket kebijaksanaan, hingga Pakdes (Paket 24 Desember 1987) yang baru lalu ini, di samping devaluasi mata uang yang cukup berarti pada tahun 1983 dan 1986. Revaluasi dollar, disusul oleh revaluasi Yen yang mungkin masih akan berlanjut, juga berpengaruh dengan menciptakan suasana yang menguntungkan bagi tindakan-tindakan liberalisasi tersebut.

Di Korea Selatan dan di Taiwan *liberalisasi di bidang perdagangan* itu sebenarnya *tidak didampingi oleh liberalisasi di bidang finansial*, dan di kedua negara ini baru belakangan ini saja diambil langkah-langkah ke arah itu; jadi boleh dikatakan bahwa liberalisasi di sektor finansial itu baru terjadi 20 sampai 25 tahun setelah liberalisasi di bidang perdagangan. Terlepas dari jarak waktunya, urutan-urutan tindakan (*sequencing*) itu mungkin merupakan masalah yang penting untuk dipelajari. Di Indonesia sebenarnya liberalisasi di bidang finansial -- seperti dimulai pada tahun 1983 dengan deregulasi sektor perbankan -- dilakukan sebelum liberalisasi di sektor riil. Kenyataan ini mungkin merupakan sebab dari (kecenderungan) instabilitas moneter yang dialami di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Walaupun demikian kita tidak dapat mengambil langkah-langkah mundur di bidang pengelolaan finansial negara. Tampaknya yang perlu dilakukan adalah usaha untuk terus melanjutkan dan mempercepat liberalisasi di bidang perdagangan khususnya dan di sektor riil pada umumnya.

Perbedaan dalam *proses liberalisasi* di bidang perdagangan antara NICs Asia dengan NICs Amerika Latin (Meksiko dan Brasilia) memang banyak

merupakan *ekonomi-ekonomi yang sudah lebih terintegrasi*. Ditinjau dari segi ini kiranya usaha-usaha liberalisasi di Indonesia juga perlu didampingi, bahkan mungkin didahului, oleh usaha-usaha untuk menciptakan ekonomi nasional yang lebih terintegrasi. Peningkatan jalur-jalur dan prasarana perhubungan, dan pengembangan institusi-institusi ekonomi merupakan langkah-langkah pokok yang perlu terus ditingkatkan.

Dengan menggunakan formula Tsiang tersebut dapat ditunjukkan bahwa (kebetulan) keempat NICs Asia tersebut mencapai kondisi tinggal landas pada saat yang hampir bersamaan. Di Taiwan propensitas untuk menabung melampaui besarnya capital-output ratio kali tingkat pertambahan penduduk pada tahun 1963, dan sejak itu secara terus-menerus perbedaan itu semakin membesar -- yang merupakan indikator tercapainya tahapan *self-sustaining growth*. Di Korea Selatan kondisi itu tercapai sekitar tahun 1966/1967; di Hongkong tahun 1965, dan di Singapura tahun 1966.⁶ Atas dasar ini mungkin dapat dikatakan bahwa *status NIC tercapai kira-kira 10 tahun setelah suatu ekonomi mencapai kondisi tinggal landas*. Tabel 6 menunjukkan peningkatan tabungan selama periode 1965-1976 di NICs Asia tersebut dan bahwa proses ini masih terus berlangsung hingga sekarang.

Oleh karena data-data "capital stock" (K) untuk Indonesia tidak tersedia rumusan Tsiang tidak dapat dipakai untuk meneliti apakah kondisi "take off" itu telah dicapai di Indonesia. Namun demikian rumusan itu dapat membantu menunjukkan permasalahan yang kini dihadapi di Indonesia. Di satu sisi tampaknya propensitas untuk menabung cenderung mengalami penurunan. Ini merupakan akibat penurunan riil pendapatan beberapa tahun terakhir ini, dan juga karena menurunnya penerimaan dalam negeri pemerintah secara riil sebagai akibat menurunnya penerimaan dari minyak. Selain itu tabungan pemerintah juga cenderung menurun karena peningkatan secara drastis beban pembayaran kembali utang luar negeri pemerintah. Di sisi lain, perkembangan *capital output ratio* dapat ditafsirkan dari perkembangan apa yang disebut *ICOR (incremental capital output ratio)* yang dapat dihitung dari perkiraan besarnya investasi tahunan. Dibandingkan dengan perkembangan di banyak negara, di Indonesia terdapat kecenderungan *ICOR* yang semakin meningkat, dan bukan menurun, dan karenanya juga terjadi peningkatan *capital output ratio*. Perkembangan ini secara menyolok terjadi pada waktu kita mengalami "boom" minyak.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa prospek bagi Indonesia akan membaik hanya bila kita berhasil meningkatkan dan mempertahankan *propensitas untuk menabung* dan jika peningkatan ketersediaan modal itu digunakan secara lebih optimal, seperti tercermin dalam *ICOR yang menurun*. Di

⁶Lihat S.C. Tsiang dan Rong I-Wu, "Foreign Trade and Investment as Boosters for Take-Off".

Tabel 6
PERKEMBANGAN TABUNGAN DI SEJUMLAH NEGARA

Negara	Tabungan Sebagai % PDB		
	1965	1976	1984
Korea (S)	8	24	30
Taiwan	17	30	32
Singapura	10	29	43
Meksiko	21	24	30
Brasilia	27	23	21
Indonesia	6	25	20
Muangthai	19	22	21
Malaysia	24	32	32
Turki	13	16	11

Sumber: World Bank, *World Development Report 1978* dan *1986*.

samping tindakan-tindakan dalam bidang ekonomi makro di atas, pengalaman NICs Asia juga menunjukkan pentingnya tiga faktor lainnya, yaitu: (1) *kebijaksanaan penanaman modal asing* yang sangat terarah dan sangat selektif, biarpun cenderung cukup restriktif; (2) *hubungan pemerintah dengan dunia usaha* (bisnis) yang sangat erat (tetapi cukup transparan) sehingga tercipta suatu kekuatan nasional yang tangguh, khususnya untuk menghadapi pihak luar dan di pasar internasional; dan (3) *prioritas tinggi yang diberikan kepada pengembangan sumberdaya manusia (human resources development)*.

Sebagai penutup kiranya kita perlu memperkirakan besarnya usaha yang harus dilakukan di Indonesia untuk dapat memasuki tahapan menjadi suatu NIC. *Pertama*, dari segi pendapatan per kepala, tingkat yang harus dicapai adalah tiga kali lipat dari yang telah dicapai dewasa ini. Hal ini berarti bahwa bila untuk usaha tersebut kita jadwalkan 15 tahun, maka secara rata-rata setiap tahunnya PDB harus bisa tumbuh dengan 9,6%. Tingkat pertumbuhan ini tidak mudah untuk dicapai, walaupun pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an yang lalu NICs Asia dapat tumbuh rata-rata di atas 10% per tahun. Jika ekonomi Indonesia hanya tumbuh dengan 6% per tahun rata-rata, maka untuk mencapai tingkat pendapatan per kepala itu diperlukan 28 tahun.

dengan 13% per tahun, jika PDB tumbuh dengan 9,6% per tahun -- atau tumbuh dengan 10% per tahun jika PDB tumbuh dengan 6% per tahun. Tingkat pertumbuhan ini kira-kira dua kali lebih cepat dari yang terjadi dewasa ini, tetapi bukan tidak mungkin untuk dicapai melihat pengalaman pada paruh kedua dasawarsa 1970-an di mana sektor manufaktur di Indonesia telah tumbuh dengan 15% atau lebih setiap tahunnya.

Ketiga, usaha meningkatkan saham sektor manufaktur dalam penyerapan tenaga kerja, dari sekitar 8% dewasa ini untuk mencapai 25%, jelas merupakan tantangan yang berat. Dewasa ini tenaga kerja di sektor manufaktur berkisar pada 5 juta orang. Dari jumlah ini pun sebagian besar diserap oleh sektor manufaktur informal dan tradisional. Jika tenaga kerja meningkat dengan 2,8% per tahun, maka dalam 15 tahun jumlah tenaga kerja di Indonesia akan meningkat dari sekitar 65 juta menjadi 98 juta orang. Hal ini berarti bahwa dalam 15 tahun mendatang itu sektor manufaktur harus dapat menyerap 25 juta orang, atau 5 kali jumlah yang sekarang. Untuk itu penambahan lapangan kerja di sektor manufaktur sesedikitnya harus mencapai 11% sampai 12% per tahun. Dengan perkataan lain, jika sektor manufaktur tumbuh dengan 13%, maka besaran yang disebut *elastisitas penyerapan tenaga kerja* harus mencapai 0,87. Artinya, setiap 1% peningkatan output sektor manufaktur harus diikuti oleh peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam sektor itu sebesar 0,87%. Tuntutan ini tidak mudah dicapai. Ada perkiraan bahwa sejauh ini elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur mencapai 0,5, tetapi untuk sektor manufaktur modern mungkin di bawah 0,2 saja. Selama periode 1970-1980, besarnya elastisitas penyerapan tenaga kerja untuk ekonomi Indonesia secara keseluruhan hanya berkisar pada 0,39.⁷ Perbandingan ini jelas menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi, bukan hanya untuk mengejar kedudukan sebagai suatu NIC, tetapi juga untuk sekedar melanjutkan pembangunan ekonomi pada tingkat pertumbuhan yang lebih wajar.

DAFTAR REFERENSI

Bahari, Zainuddin, Ed., *Lessons from Taiwan -- Pathways to Follow and Pitfalls to Avoid*. Kuala Lumpur: ISIS Malaysia, 1986.

- Galenson, Walter. *Foreign Trade and Investment -- Economic Growth in The Newly Industrializing Asian Countries*. Madison: The University of Wisconsin Press, 1985.
- Johnson, Chalmers. "Political Institutions and Economic Performance: The Government - Business Relationship in Japan, South Korea, and Taiwan." Dalam *Asian Economic Development -- Present and Future*. Edited by Robert A. Scalapino, Seizaburo Sato, Jusuf Wanandi. Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, 1985.
- Kihl, Young Whan. "East Asia's Rise to Economic Prominence: Aspects of the Political Economy of Development." *Asian Perspective*, Vol. 11, No. 2 (Fall-Winter 1987).
- Mukerjee, Dilip. *Lessons from Korea's Industrial Experience*. Kuala Lumpur: ISIS Malaysia, 1986.
- Park, Ungsuh. "Economic Development Model of Japan: Transferability to Korea and Taiwan," Dalam *Asian Economic Development*.
- Soesastro, Hadi. "Japan 'Teacher' -- ASEAN 'Pupils': Can It Work?" Dalam *ibid.*
- "The Western Pacific in the Year 2000: Economic Trends and Their Implications for Korea and Indonesia." Dalam *Korea and Indonesia in the Year 2000*. Edited by Jae Kyu Park dan Jusuf Wanandi. Seoul: Kyungnam University Press, 1985.